

**Pembukaan Pelatihan Green Budget Tagging dan Scoring System
30 Juni 2021**

Agenda Pembukaan

1. Mendengarkan lagu Indonesi Raya
2. Sambutan oleh Erlangga sebagai perwakilan Madani
3. Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Asisten I Setda Maluku
4. Penyerahan kenang-kenangan dari Madani

Sambutan oleh Erlangga

- Memperkenalkan Yayasan Madani serta mengapresiasi partisipasi Pemprov Maluku untuk menghadiri kegiatan pelatihan.
- Memaparkan tujuan Madani mengadakan pelatihan Green Budget Tagging untuk mendorong Pemprov Maluku menyelaraskan RPJMD dengan RAD GRK supaya nantinya dapat mengakses sumber dana hijau lainnya yang dapat mendukung Pemprov Maluku selain dari APBD yang telah dimiliki.
- Menjadi kegiatan awal untuk membangun komunikasi yang lebih baik untuk bersama-sama mendorong Maluku berdaya saing secara ekonomi dan mengendepankan pelestarian lingkungan.

Sambutan oleh M. Saleh Thio, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Setda Maluku

- Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan yang lebih dari 90% nya merupakan lautan dengan jumlah pulau sekitar 1.340 pulau dan Panjang garis pantai 11.000 km. Kondisi geografis ini menjadikan Provinsi Maluku sangat rentan akan dampak perubahan iklim.
- Provinsi Maluku termasuk wilayah dengan indeks resiko bencana yang tinggi, dengan 12 jenis ancaman antara lain: banjir, banjir bandang, tanah longsor, gelombang ekstrem, abrasi, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem dan kegagalan panen yang sering dianggap sebagai hama-penyakit.
- Proyeksi iklim periode 2016-2045 menunjukkan adanya peningkatan suhu temperatur sekitara 0,5 derajat celcius hingga 1,5 derajat celcius dengan iklim yang ekstrim – curah hujan tinggi dan kemarau berkepanjangan
- Dengan proyeksi kenaikan permukaan laut 5 cm per tahun, di tahun 2100 desa-desa yang berada di pesisir pulau akan terelokasi ke dataran tinggi.
- Beberapa kebijakan pemda dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi:
 1. Pergub no. 18 tahun 2012 tentang RAD GRK Provinsi Maluku 2010-2030
 2. SK Gubernur no. 255.A tahun 2017 tentang pembentukan tim penyiapan Road Map mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Maluku (RAD MAPI-PB)
 3. Dukungan fasilitasi dan koordinasi dengan Bappenas, KLHK dan APIK-USAID dalam rangka mewujudkan peran daerah dalam implementasi NDC

4. Dukungan pendanaan untuk kegiatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tertuang dalam APBD OPD sektor terkait di Provinsi Maluku.
 5. Menyambut baik fasilitasi pelatihan ini dalam rangka mewujudkan peran daerah dalam implementasi NDC melalui peningkatan kapasitas.
- Menghimbau tiap peserta untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya.
 - Harapan dari kegiatan pelatihan green budget tagging:
 1. Madani dapat memfasilitasi Pemda Maluku dalam mengakses pendanaan yang berbasis ekologi atau pendanaan asing yang berada di KLHK supaya pembangunan rendah karbon dapat diwujudkan.
 2. Memahami metode dan strategi mendapatkan sumber pendanaan baik publik maupun non publik
 3. Menentukan program/kegiatan prioritas untuk mendukung perencanaan program hijau, dimana peningkatan ekonomi terus bertumbuh, pembangunan tetap berlanjut dan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga.
 4. Merumuskan Langkah konkret yang bisa disepakati bersama sebagai acuan dalam rangka penanganan perubahan iklim di wilayah Maluku
 - Membuka pelatihan GBT

Pelatihan Green Budget Tagging dan Scoring System
Day 1
30 Juni 2021

Desiana Samosir – Fasilitator

- Perkenalan tujuan pelatihan: meningkatkan kapasitas OPD dalam manajemen penganggaran dan penentuan program prioritas, program hijau dalam memobilisasi sumber-sumber pendanaan baik publik dan non publik
- Memaparkan target yang ingin diketahui dari kegiatan pelatihan ini
 - a. Konsep, sistem, dan manfaat GBT
 - b. Peluang pendanaan, metode, dan strategi pendanaan
 - c. Implementasi GBT dalam RAD
- Mengingatkan mengenai protokol kesehatan
- Memperkenalkan trainer
- Transisi pengisian materi oleh Pak Joko

Joko Tri H – Trainer

- Apresiasi pada Madani telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan
- Isu yang sangat signifikan manfaat dan benefit yang nantinya dapat diterima daerah, untuk meningkatkan komitmen daerah.
- Hari pertama akan pelatihan budget tagging, hari kedua akan budget scoring dan performance scoring.
- Tujuan: transfer pengetahuan supaya di masa depan daerah dapat melakukan mekanisme ini secara mandiri dalam penyusunan RPJMD dan APBD di kemudian hari
- Budget tagging, budget scoring, performance scoring merupakan tools, rangkaian mekanisme tata kelola administrasi penganggaran
- Bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD dapat ditelusuri outcome nya seperti apa.
- Bagaimana planning dan budgeting dapat diselaraskan (RPJMD dan APBD)
- 1.** 30-40% APBD tidak bermanfaat bagi masyarakat
 - Padahal tren anggaran transfer ke daerah dan dana desa itu terus meningkat tiap tahunnya
 - 3 fungsi dasar APBN dan APBD
 1. Fungsi stabilitas
 2. Fungsi alokasi
 3. Fungsi distribusi
 - Di pemerintah pusat sudah menerapkan budget tagging yang sekarang sistemnya sudah *dynamic tagging* yang sifatnya lintas sektoral. Sedangkan pelatihan ini lebih ke tagging statis yang hanya satu sektor.
 - Dalam proses klusterisasi, sudah ada pembahasan lintas sektor. Ketika bicara green budget tagging, tidak hanya menjadi tugas/pekerjaannya utamanya dinas LH, tapi bagaimana ini juga dapat dibagi ke dinas-dinas lainnya.
- 2.** RPJMD tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena visi misi kepala daerah terhambat oleh Ego Sektoral
 - Contoh: Ketika Kepala Daerah memiliki visi untuk menjadikan Maluku sebagai center of blue economy di Indonesia, daerah terjebak dengan ego sektor membebankan pencapaian visi tersebut sebagai tanggung jawab dinas kelautan dan perikanan saja.

3. Restrukturisasi RPJMD dan APBD

- Belanja selama pandemi meningkat, tapi pendapatan agak tertekan.
- Didalam proses RPJMD yang melakukan proses pilkada Desember 2020 lalu, ketika menyusun RPJMD, proyeksi makro-ekonomi, pajak, maupun retribusi harus melihat realita di lapangan.
- Contoh: kondisi pandemi, proyeksi pajak dan retribusi tidak masuk akal untuk naik secara eksponensial karena kondisi masyarakat yang ekonominya sedang terganggu.

Next

- Kita harus mencari peluang baru, yang tidak bisa diberikan oleh sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang sifatnya konvensional, dari Pengembangan Model Bisnis Jasa Lingkungan.
- Maluku punya potensi SDA yang luar biasa, harus dioptimalkan
- Yang perlu diperbaiki: investasi masa depan.
- Perlu disadari, dana publik yang ada tidak cukup.
- Dana APBD dan APBD: hanya bisa mencukupi 20% kebutuhan. Ketika ego sektoral masih tinggi, tiap sektor merasa sektornya paling penting.
- Perlu peran serta dan investasi dari swasta dan pasar. Seperti CSR, filantropi, masyarakat sipil, bantuan internasional baik bilateral maupun multilateral
- Perlu ada mekanisme pengelolaan CSR supaya dana yang digelontorkan benar-benar yang diperlukan oleh daerah.
- Bagaimana cara menarik 80% dana yang bisa datang dari investor dan pasar? Kuncinya adalah memperbaiki spending 20% yang telah dimiliki dari Dana Publik tersebut.
 - a. Perbaikan tata kelola (tata ruang dan tata uang) budget tagging dan budget scoring
 - b. Perubahan mekanisme pengelolaan sektoral
 - c. Skema insentif dan dis-insentif
- Cara memperbaiki tata uang dengan mekanisme budget tagging dan budget scoring – akan memperjelas anggaran mana saja yang terkait langsung dengan inti kegiatan dan belanja supporting atau “hore-hore”
- Budget tagging tidak mengharamkan belanja supporting, tapi bicara mengenai komposisi yang sesuai. Rasio Kewajaran
- User utama dari praktik tagging ini adalah Bappedda dan Kemenkeu
- Penganggaran didasarkan pada *performance-based* yang mengacu pada upaya pemenuhan RPJMD. Tidak bisa menambah-nambah kegiatan untuk menambah anggaran karena akan tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- Manfaat dari budget tagging di nasional: terkait kegiatan yang berhubungan dengan mitigasi perubahan iklim di 6 K/L dari 263 kegiatan yang masuk kategori kegiatan mitigasi perubahan iklim menjadi 159 kegiatan, ternyata alokasi anggarannya naik dari 72.351 triliun menjadi 81.794 triliun
- Hal ini mematahkan anggapan bahwa semakin banyak kegiatan akan semakin besar pula anggarannya.
- Rujukan dari tagging: Permendagri 90
- Akan ada klusterisasi isu untuk green budget tagging yaitu:
 1. Perlindungan SDA
 2. Pertanian Untuk dinas kelautan dan perikanan, kluster ini diganti dengan perikanan dan kelautan.
 3. Energi dan Industri

4. Transportasi dan Tata Kota/Tata Daerah

5. Kesehatan dan Pendidikan

6. Penanggulangan Bencana

7. *Enabling Condition*

- Praktik tagging akan didasarkan atas evaluasi RPJMD, misi mana yang termasuk dalam isu green, OPD yang hadir hari ini sudah dideteksi dari visi misi RPJMD Maluku
- Ketika praktik tagging sudah dilakukan, dapat memperluas cakupan dari sumber-sumber pembiayaan baru non APBD
- Dapat mendorong untuk pemanfaatan dana internasional
- Hasil dari pelatihan budget tagging harapannya bisa “membuka mata” Pemprov Maluku soal limitasi pendanaan daerah, mengoptimalkan dana yang terbatas tersebut dengan sebaik mungkin, dan bisa *breach out* untuk mengakses dana dari GCF atau sumber pendanaan hijau lainnya.

Sesi Tanya Jawab

1. La Naibu – Staf Perencanaan, Dinas Pertanian

- Apa fokus dari kegiatan pelatihan ini? Apakah mengenai kebocoran anggaran, monitoring anggaran pemerintah daerah/pusat, pemanfaatan anggaran, bagaimana posisi Madani dalam monitoring kebocoran anggaran?
- Pak Joko: tidak bicara kebocoran anggaran. Kegiatan ini tujuannya untuk mencari cara bagaimana memperbaiki tata kelola (hulu) dari permasalahan yaitu menyelaraskan alokasi anggaran (APBD) dengan visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.
- Memperbaiki tata administrasi – termasuk nomenklatur kinerja – dalam perencanaan dan penganggaran.
- How to quantify kinerja
- Membantu teman-teman daerah untuk mengenali pola-pola belanja masing-masing OPD supaya bisa mensinkronkan dengan tujuan daerah.
- Mengenali pola-pola belanja di masing-masing OPD dan menyelaraskannya dengan RPJMD.

2. Since Sipahelut – ESDM

- Mengapresiasi kerja sama antara Madani dengan BKF untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini

3. Fence – Din. Kehutanan

- Program Kegiatan, sudah diatur dengan Permendagri 90 tahun 2019. RPJMD akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Permendagri tersebut.
- Meminta gambaran/masukan/penjelasan terkait bagaimana anggaran “hore-hore” tidak dapat dialokasikan.
- Bagaimana substansi dari penganggaran kita ke depan, supaya dapat diakomodir di tiap OPD
- (Formula Ideal) Kira-kira dalam struktur APBD, porsi nya berapa persen untuk mendukung GBT ini? Kalau tidak, anggaran hore-hore akan terus berjalan.

Pak Joko:

- Mendorong adanya tematik anggaran yang merujuk tematik pembangunan. Contoh:
 - a. Perubahan Iklim – Adaptasi dan Mitigasi
 - b. Gender
 - c. Infrastruktur
 - d. Kesehatan dan Pendidikan

- e. Kerjasama internasional
- Adanya tematik ini untuk membuka budget sektoral. Jadi semua K/L dapat “mengeroyok” dan mengerjakan isu tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing.
- Pendekatan sektoral tidak akan bisa mengoptimalkan semua sumber daya.
- Indikator Kepala Daerah: minimal ada 5.
 - a. Ekonomi
 - b. Kesejahteraan
 - c. Pelayanan Publik
 - d. Infrastruktur
 - e. Daya Saing Daerah
- Budget tagging akan mengevaluasi hasil “keroyokan” tersebut.
- Budget tagging bukan mengharamkan belanja “hore-hore” melainkan mempertanggung jawabkan belanja tersebut.
- Hanya bicara rasio kewajaran dari belanja pegawai

Pak Doddy

- Mengenai integrasi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dan kaitannya dengan Permendagri 90 tahun 2019.
- Harapan: Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah ada dasar perencanaannya.
- Merujuk ke permendagri 90, jangan-jangan kegiatan yang sudah dilakukan saat ini hanya mereplikasi kegiatan yang dulu-dulu telah dilaksanakan tanpa memperhatikan nomenklatur program, indikator kinerja/capaian, dll.
- Sebetulnya kita harus merumuskan sesuai dengan kinerja, apa yang diinginkan, sesuai dengan visi misi.
- Setelah kinerja ketahuan, baru diarahkan ke judul nomenklatur kegiatan yang ada di permendagri 90. Impact, outcome, output, sub-output.

Desiana S – Fasilitator

- Review sebelum makan siang dan pembagian kelompok praktikum
- Budget OPD adalah cerminan dari upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah
- Dari peserta yang hadir dibagi menjadi 3 kelompok, tiap OPD harus 1 kelompok.
- Meja 1: Kehutanan, LH, Pertanian, Bappeda
- Meja 2: Ketahanan Pangan, Perhubungan, Pariwisata, Kesehatan, Bappeda
- Meja 3: Kelautan dan Perikanan, ESDM, PU PR, Bappeda

Joko Tri H

- Potensi Pendanaan diluar dana public
- Ketika tata kelola hulu sudah diperbaiki: cara pandang sektoral dijadikan isu tematik bersama yang bisa dikerjakan bersama, menjadi indikator sasaran daerah dalam RPJMD, menjadi indikator Kepala Daerah, kemudian *dicascading* ke bawah ke kepala dinas (untuk dikerjakan secara spesifik) tata kelola yang sudah baik ini, hasilnya dapat dijadikan modal dalam melihat potensi pendanaan.
- APBN dan APBD kapasitas maksimal hanya 20%. Sedangkan 80% dari sektor non-pemerintah.

- Isu LH dan Kehutanan: pengelolaan dana DBH DR sedang diperbaiki, sembari mendorong revisi PP 23.
- Dana Insentif Daerah memaknai konservasi sebagai *revenue generator* untuk mengakses dana reward/insentif pada daerah atas kinerja dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan daerah.
- Di 2019, DID diperluas menjadi pemberian insentif pada daerah yang bisa menyelesaikan isu sampah.
- Green Climate Fund isu dan dana yang besar. Akan sangat membantu bagi daerah yang memiliki *megaproject* yang benar-benar tidak dapat dipenuhi dengan dana publik saja.
- Untuk itu, dalam mengoptimalkan penggunaan dana publik, sangat penting:
 - Perlu menentukan output outcome terlebih dahulu, baru membuat kegiatan
 - Yang terjadi: kadang terlalu fokus pada melakukan banyak kegiatan, tapi aktivitas tersebut tidak menggambarkan jalan menuju output/outcome.
 - Alhasil ketika ada yang akan memberikan insentif, akan sukar diukur
 - Keberhasilan pencapaian output, akan memudahkan daerah untuk mengakses sumber pendanaan lain.

KRITERIA UTAMA dan KATEGORI KINERJA 2020

DID 2020 terdiri dari 3 kriteria utama sebagai eligibilitas daerah penerima DID dan 9 kategori yang terdiri subkategori yang penilaiannya dilakukan secara mandiri/individual. Terdapat kategori kinerja yang baru, yaitu *creative financing*, *mandatory spending*, ketepatan waktu pelaporan, peningkatan ekupar, dan peningkatan investasi

Kriteria Utama

-  **Opini BPK atas LKPD (WTP)**
-  **Penetapan Perda APBD Tepat Waktu**
-  **Penggunaan e-government (e-budgeting dan e-procurement)**

Kategori Kinerja

- 1. Kesehatan Fisikal dan pengelolaan keuangan Daerah**
 - a. Kesehatan Daerah
 - b. Stabilitas Penghasilan Berbasis Daerah
 - c. Pembiayaan Kasual (Baru)
 - d. Mandatory spending (Baru)
 - e. Ketepatan waktu pelaporan (Baru)
- 2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan**
 - a. Angka Partisipasi Murni
 - b. Peta Mutu Pendidikan
 - c. Rasio-rasio Nilai Ujian Nasional
- 3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan**
 - a. Penanganan Stunting
 - b. Rasio yang menunjukkan treatment terungkap
 - c. Peningkatan di fasilitas kesehatan

- 4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur**
 - a. Akses sanitasi layak
 - b. Sumber air minum layak
- 5. Kesejahteraan Masyarakat**
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Maki
 - b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 6. Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b. Penghargaan Penyelenggara Daerah
 - c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - d. Inovasi Daerah
- 7. Peningkatan ekupar (Baru)**
- 8. Peningkatan investasi (Baru)**
- 9. Peningkatan Sampah**

Area Sektor Mitigasi GCF di Indonesia

Hutan & Guna Lahan

- Pencegahan kebakaran hutan
- Pengurangan deforestasi
- Restorasi gambut
- Rehabilitasi hutan dan lahan
- Implementasi hutan berkelanjutan
- Restrukturisasi industri di sektor kehutanan
- Rehabilitasi area laut dan pantai

Area dampak GCF



Energi & Transportasi

- Energi terbarukan
- Efisiensi energi
- Biofuel dalam transportasi
- Transportasi publik yang rendah karbon

Area dampak GCF

- Transportasi
- Akses dan pembangkit energi

Limbah

- Waste to Energy
- Manajemen limbah dengan daur ulang dan pengomposan
- Manajemen limbah cair

Area dampak GCF

- Akses dan pembangkit energi
- Bangunan, perkotaan, industri dan peralihan

Pertanian

- Produksi komoditas yang berkelanjutan
- Penggunaan tanaman yang rendah emisi
- Smart agriculture, termasuk konsep penggunaan air yang efisien
- Pemanfaatan pupuk sebagai penyubur dan biogas

Area dampak GCF



Proses Industri dan Penggunaan Produk

- Green industry
- Green buildings

Area dampak GCF

- Bangunan, perkotaan, industri dan peralihan

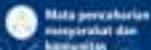
Area Sektor Adaptasi GCF di Indonesia

Peningkatan ketahanan masyarakat dan negara melalui:

Ketahanan Ekonomi

- Peningkatan ketahanan iklim bagi petani dan nelayan di area rentan
- Pemanfaatan limbah organik untuk energi
- Penggunaan energi terbarukan di area terpencil
- Pengembangan tanaman tahan iklim untuk bioenergy
- Pemanfaatan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan
- Efisiensi dalam pola konsumsi energi
- Perkebunan dan pertanian yang berkelanjutan
- Manajemen lahan yang efisien

Area dampak GCF



Ketahanan sosial dan mata pencaharian

- Program kesehatan publik terkait perubahan iklim
- Inovasi teknologi dan partisipasi komunitas dalam kesehatan terkait adaptasi perubahan iklim
- Sistem peringatan bencana
- Infrastruktur yang tahan iklim
- Persiapan untuk pengurangan risiko bencana

Area dampak GCF



Ketahanan ekosistem

- Restorasi ekosistem dan konservasi
- Kehutanan sosial
- Manajemen pantai yang berkelanjutan
- Manajemen air bersih
- Manajemen DAS yang terintegrasi
- Area perkotaan yang tahan iklim

Area dampak GCF



Praktikum Green Budget Tagging

Dokumen yang harus dipersiapkan

- DPA/RKA 2021
- Renja
- Renstra

Pak Doddy

- Klasifikasi kegiatan/subkegiatan mana yang menunjukkan dukungan terhadap pembangunan Ekonomi Hijau (kegiatan mana yang akan ditagging)
- Lihat RKA 2.2.1 (rincian belanja)
- Kelompokkan dari seluruh belanja yang dilaksanakan mana belanja yang mendukung 6 parameter yang akan digunakan
 - a. Perlindungan SDA
 - b. Pertanian Untuk dinas kelautan dan perikanan, kluster ini diganti dengan perikanan dan kelautan.
 - c. Energi dan Industri
 - d. Transportasi dan Tata Kota/Tata Daerah
 - e. Kesehatan dan Pendidikan
 - f. Penanggulangan Bencana
 - g. *Enabling Condition*
- Kegiatan supporting masuk ke *enabling condition*
- Summary berapa total perbelanja yang mendukung green budgeting per cluster per belanja operasional (pegawai & barang jasa) & modal
- Teknis Pelaksanaan Tagging akan dijelaskan lebih lanjut dalam *Hand Out Green Budget Tagging*

Pak Joko

- Dalam tagging ini kita melakukan multiscreening
 1. Apakah kegiatan ini terkait dengan isu *green*. Dicari dari tiap kegiatan masing-masing OPD,
 2. Kecuali infrastruktur dasar, pembangunan yang dapat dilihat masuk ke kegiatan tiap-tap sektor. Infrastruktur dasar masuk ke kebijakan pendukung (*enabling condition*)

Setelah Breakout Session

Komentar pada presentasi Dishut

	Page Anggaran	Perencanaan BKA	Pembaca	Ruang & Waktu	Suspensi/kelebihan	Penelitian/kelebihan	Peningkatan/kelebihan
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

- Memasukkan kegiatan perjalanan dinas pada kluster transportasi dan tata kota dikarenakan outcome/keluaran dari kegiatan perjalan dinas tersebut adalah mendukung pembangunan Pelabuhan pengumpuan.
- Yang dimasukkan dalam kluster enabling condition adalah kegiatan monitoring/pengawasan pengoperasian Pelabuhan pengumpang regional
- Adanya perbedaan peletakan pagu anggaran perjalanan dinas pada kluster parameter sesuai dengan OPD dan *enabling condition* dengan Dishut memunculkan pertanyaan.

Bappeda

- Kegiatannya adalah perumusan dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon.
- Kegiatan dan program dari Bappeda banyak yang masuk pada kluster *enabling condition* karena memang sifatnya yang banyak sebagai koordinator, mendampingi dan memfasilitasi.
- Sedangkan untuk program teknis memang banyak dilakukan oleh tiap-tiap OPD.

Presentasi Dinas ESDM

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

		Page Anggaran	Per Belanja SKA	Pembelian	Energi & Inisiasi	Transportasi dan Tata Rata	Pendidikan Kesehatan	Peningkatan bencana & Crat condition
32								
33	Program Peningkatan Saah Kesehatan	338.888.888	300.888.690					
34	Kegiatan Pemetaan dan Pemetaan Air Tanah untuk mitigasi air tanah dalam daerah produksi	180.000.000	100.000.000					
35	Sah Kegiatan 1 Pemetaan dan pengolahan data serta pemetaan air tanah pada wilayah air tanah	300.000.000	300.000.000					
36	5.1 Belanja Operasional		300.000.000					
37	5.1.01 Belanja Pegawai		20.000.000					
38	5.1.01.01 Belanja gaji dan tunjangan PNS		20.000.000					
39	5.1.02 Belanja Barang		300.000.000					
40	5.1.02.01 Belanja barang		1.700.000					
41	5.1.02.02 Belanja jasa							
42	5.1.02.03 Belanja Perjalanan Dinas		300.000.000					
43	5.2 Belanja Modal							
44	5.2.01 Belanja modal tanah							
45	5.2.02 Belanja modal peralat dan mesin							
46	5.2.03 Belanja modal peralat dan bangunan							
47	Kegiatan Pemetaan dan Pemetaan Air Tanah dalam daerah produksi	300.000.000	300.000.000					
48	Sah Kegiatan 1 Pemetaan dan pengolahan data serta pemetaan Air Tanah	300.000.000	300.000.000					

- Untuk belanja barang, perlu dicek kembali uraian rincian objek belanjanya. Untuk apa barang yang dibeli tersebut? Kalau belanja barang yang dibutuhkan untuk program teknis, baru bisa masuk kluster teknis.
- Pengumpulan dan pengolahan data informasi nilai perolehan air tanah, perlu dilihat outputnya apa. Kalau output tersebut menjadi data yang dasar dan dapat dijadikan pendukung, perlu dimasukkan ke *enabling condition*.
- Important! Check and Re-check on tiap anggaran/kegiatan yang ada anggarannya itu outcome besarnya apa.

Dinas Ketahanan Pangan

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

		Page Anggaran	Per Belanja SKA	Pembelian	Energi & Inisiasi	Transportasi dan Tata Rata	Pendidikan Kesehatan	Peningkatan bencana & Crat condition
32								
33	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.822.248.940	1.411.248.940					
34	Kegiatan Pemetaan dan Pemetaan Air Tanah untuk mitigasi air tanah dalam daerah produksi	2.004.000.000	1.804.000.000					
35	Sah Kegiatan 1 Pemetaan dan pengolahan data serta pemetaan Air Tanah	2.004.000.000	1.804.000.000					
36	5.1 Belanja Operasional		1.804.000.000					
37	5.1.01 Belanja Pegawai		18.000.000					
38	5.1.01.01 Belanja gaji dan tunjangan PNS		18.000.000					
39	5.1.02 Belanja Barang		1.804.000.000					
40	5.1.02.01 Belanja barang		890.000.000					
41	5.1.02.02 Belanja jasa		80.000.000					
42	5.1.02.03 Belanja Perjalanan Dinas		400.000.000					
43	5.2 Belanja Modal							
44	5.2.01 Belanja modal tanah							
45	5.2.02 Belanja modal peralat dan mesin							

- Poin penting yang harus diperhatikan dalam memasukkan kegiatan ke suatu kluster, adalah penyeragaman nomenklatur. Jadi misal, output nya adalah pengadaan bibit. Tapi nama kegiatannya tidak mencerminkan output tersebut tapi justru “koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan, dll”
- Perlu ada penyesuaian pemberian nama kegiatan, sub-kegiatan dengan output dan outcome tiap kegiatan di kemudian hari. Sehingga tidak perlu membuka dokumen yang lebih detail.

Tanya Jawab

- Bappeda menanyakan kenapa penanggulangan bencana dan *enabling condition* digabung jadi satu parameter.
- Pak Joko: dua isu tersebut dipisah. Jadi ada 7 parameter, yaitu:
 - a. Perlindungan SDA
 - b. Pertanian Untuk dinas kelautan dan perikanan, kluster ini diganti dengan perikanan dan kelautan.
 - c. Energi dan Industri
 - d. Transportasi dan Tata Kota/Tata Daerah
 - e. Kesehatan dan Pendidikan
 - f. Penanggulangan Bencana
 - g. *Enabling Condition*
- Bappeda menanyakan output yang menghasilkan dokumen itu akan selalu masuk kluster *enabling condition* atau situasional. Jadi bisa masuk *enabling condition* atau kluster teknis?
- Pak Joko: untuk proses generating data dalam membuat suatu dokumen: masuk kluster teknis, tapi kalau sosialisasi dari hasil dokumen tersebut masuk ke *enabling condition*.
- Apakah Pendidikan dan kesehatan perlu dipisah kolomnya?
- Pak Joko: Pendidikan dan kesehatan kegiatan dan interkasinya umumnya banyak yang beririsan, sehingga tidak perlu dipisah.

Penutup – Pak Doddy

- Kegiatan tagging ini untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah daerah untuk mengerjakan satu keinginan/tujuan yang sama.
- Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik.
- Tema/rencana yang sedang dibicarakan bersama, untuk sama-sama diselesaikan dan ditackle ada permasalahan pembangunan hijau.
- Dari DPA/RKA yang sudah dimiliki tiap OPD, kita sedang bertujuan untuk melihat seberapa besar proporsi, persentase untuk mendukung suatu hal yang kita inginkan. Yaitu untuk mewujudkan pembangunan hijau ini.
- Kegiatan tagging ini bisa dilakukan untuk isu yang berbeda-beda, bisa blue budget tagging, gender budget tagging, visi misi budget tagging, tergantung kebutuhan.
- Intinya: tagging ini digunakan untuk melihat bahwa pada dasarnya suatu isu itu bukan merupakan tanggung jawab satu dinas tertentu, melainkan perlu diselesaikan secara “keroyokan.”

Poin penting terkait penempatan kegiatan ke dalam Kluster:

1. Soft infrastructure masuk ke enabling condition, seperti perjalanan dinas, bimbingan teknis, capacity building, sosialisasi, workshop, seminar, honorarium, belanja pegawai
2. Untuk hard infrastructure, kluster teknis; menghasilkan hal produktif, pengadaan bibit, pembangunan, penyediaan, masuk ke kluster teknis tiap OPD

Dokumentasi







Recording... The Training Book Budgeting View Settings

Microsoft Excel - 1997 Metadata

	Pelaksanaan BMS	Pertanian	Energi & Industri	Transportasi dan Tata Kota	Perubahan Kesehatan	Peranggungan Kesehatan & Sumbing condition
21						
22	Program					
23	Subprogram					
24	Sub Kegiatan 1 ...					
25	Belanja Operasional					
26	Belanja Pegawai					
27	Belanja gaji dan tunjangan PNS					
28	Belanja barang, jasa					
29	Belanja jasa	800.000.000				
30	Belanja Perjalanan Dinas					
31	Belanja Modal					
32	Belanja modal tanah					
33	Belanja modal perabotan dan mesin					
34	Belanja modal gedung dan bangunan					
35	Sub Kegiatan 2 ...					
36	Belanja Operasional					
37	Belanja Pegawai					
38	Belanja gaji dan tunjangan PNS					
39	Belanja barang, jasa					
40	Belanja jasa					
41	Belanja perjalanan dinas					
42	Belanja Modal					
43	Belanja modal tanah					
44	Belanja modal perabotan dan mesin					
45	Belanja modal gedung dan bangunan					

Zoom Meeting User Name

